

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KETIDAK PATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP OPINI AUDIT (STUDI PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU)

Helkia Yohana Simanjuntak¹, Agustiawan^{2*}, Annie Mustika Putri³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau^{1,2,3}

e-mail: helkiayohan@gmail.com¹, agustiawan@umri.ac.id^{2*}, annemustika@umri.ac.id

Abstract: *This study aims to examine the effect of the internal control system (SPI), and non-compliance with government accounting standard laws and regulations (SAP) on audit opinions. The sample in this study were auditors at the Riau Province Representative Office of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI Pekanbaru). This research is a quantitative research. This study uses primary data collected using a questionnaire. In this study, the sample was 55 respondents using a saturated sample. The analysis tool used is SPSS 2.6. Based on the results of data analysis, it shows that the Internal Control System (SPI), and Non-Compliance with Government Accounting Standards Legislation (SAP) have an effect on Audit Opinion.*

Keywords: *Internal Control System, Non-Compliance with Laws and Regulations on Government Accounting Standards, Audit Opinion.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara yang dilakukan dengan baik akan berdampak pada suksesnya pembangunan nasional. Perlu adanya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara harus terbebas dari penyimpangan dan berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga independen yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara. BPK merupakan suatu institusi yang dipercaya dapat mewujudkan *good corporate & good governance* dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain

Peran auditor telah menjadi pusat kajian dan riset di kalangan akademisi tidak hanya itu, praktisi juga semakin kritis dengan selalu

menganalisa kontribusi apa yang diberikan auditor (Adnyani et al., 2014). Laporan Auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang telah ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Pemeriksa BPK dalam melaksanakan tugasnya membuat suatu laporan hasil pemeriksaan keuangan berupa opini, dan mengungkapkan dua jenis temuan, yaitu terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

Setiap tahun, BPK memeriksa laporan keuangan entitas pemerintah dengan tujuan memberi opini atas kewajaran laporan keuangan. Pendapat audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terdiri dari 4 opini, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan

Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Opini (TMP).

Fitra Riau menilai, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Riau tidak menunjukkan kinerja baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran, sebagaimana berdasarkan kasus yang ditemukan selalu berulang-ulang setiap tahunnya, terutama yang berdampak pada kerugian negara. Jumlah temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, ditemukan sejumlah 170 kasus dalam dua tahun 2018-2019, terdiri dari 74 kasus yang merugikan kerugian negara, 32 kasus berpotensi menimbulkan kerugian, dan 38 kasus yang berakibat adanya kekurangan penerimaan negara/daerah, serta 26 kasus terjadinya penyimpangan administrasi yang tidak berdampak finansial. (Inforiau.id, 2020).

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum maksimal melakukan perbaikan kinerja keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan, hal itu dibuktikan dengan adanya temuan yang berulang-ulang dari tahun ketahun, bahkan terdapat peningkatan nilai kerugian negara dalam dua tahun terakhir. Dapat diketahui bahwa masih terdapat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan didalam menjalankan pemerintahannya dan tata cara membuat laporan pertanggungjawaban yang masih kurang oleh entitas pemerintah daerah.

Selain sistem pengendalian intern (spi) faktor lainnya yang dapat mempengaruhi opini audit yaitu ketidak patuhan pada peraturan perundang-undangan standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan salah satu faktor penting yang harus

diperhatikan terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah selain pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal. Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah audit telah mengikuti serangkaian prosedur yang spesifik, tata cara, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (Arens, 2015). Standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK-RI menyatakan kewajiban pemeriksa untuk menyiapkan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang mengungkapkan temuan ketidakpatuhan yang berpengaruh secara langsung dan materil terhadap laporan keuangan daerah.

Penelitian mengenai pengaruh kepatuhan terhadap perundang-undang terhadap opini audit yang diteliti yang oleh (Santi Ananda Putri, 2018) menunjukkan bahwa pengaruh kepatuhan terhadap undang-undang berpengaruh terhadap opini audit. Namun sebaliknya hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mahardika Dwi Putri, 2018) menunjukkan bahwa pengaruh kepatuhan terhadap perundang-undang tidak berpengaruh terhadap opini audit.

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) yang meneliti mengenai sikap pribadi dan pemahaman intuitif atas hubungan interpersonal. Teori ini menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan tingkah laku seseorang. Menurut Heider ada dua sumber atribusi terhadap tingkah laku, yaitu atribusi internal atau atribusi

disposisional dan atribusi eksternal atau atribusi lingkungan. Atribusi internal menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang disebabkan oleh sifat-sifat atau disposisi (unsur psikologis yang mendahului tingkah laku). Sementara atribusi eksternal menjelaskan bahwa tingkah laku seseorang disebabkan oleh situasi tempat atau lingkungan orang itu berada.

Opini Audit

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) yaitu :

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
- b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures).
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Efektivitas system pengendalian intern (spi).

Opini atau pernyataan pendapat merupakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit dengan adanya kewajaran informasi terhadap laporan keuangan yang telah disajikan dan diberikan atas pertimbangan profesional akuntan yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman pada sistem pengendalian internal pemerintah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Elmaleh (2006) dalam Fatimah (2014) pengendalian internal yang memadai diperlukan sebagai salah satu metode untuk mencegah terjadinya kecurangan dan ketidakakuratan pelaporan keuangan.

Opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah akan dipengaruhi oleh SPI yang ada pada lingkungan entitas yang diaudit. SPI ini didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi kelemahan yang berakibat pada permasalahan dalam aktivitas pengendalian yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.

Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah selain pemeriksaan terhadap sistem pengendalian internal. Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah audit telah mengikuti serangkaian prosedur yang spesifik, tata cara, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (Arens, 2015).

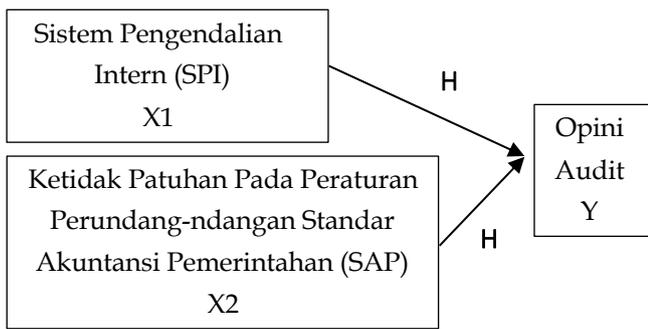
BPKRI mengategorikan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan dampak terhadap laporan keuangan yang mungkin terjadi karena perbuatan ketidakpatuhan. *The audit should be designed to provide reasonable assurance of detecting material misstatements resulting from noncompliance that have a material and direct effect on the financial statement* (Arens, 2012). Dampak ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dibagi menjadi kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terdiri atas temuan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kelompok temuan potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kelompok temuan kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, kelompok temuan

administrasi dan kelompok temuan indikasi tindak Pidana (BPK-RI, 2010).

Menurut Arens, Elder and Beasley (2008), atas tindakan illegal yang ditemukan maka sikap auditor harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap laporan keuangan termasuk kecukupan pengungkapannya, jika tidak auditor harus memodifikasi laporan audit. Sesuai dengan pengelompokan jenis temuan, kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan dianggap memiliki 7 jenis akibat, yaitu kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, temuan administrasi, temuan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Dari penelitian yang pernah dilakukan, Atyanta (2011) dalam Fatimah (2014) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ditemukan kasus kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi dan ketidakefektifan menjadi kendala dalam pencapaian opini WTP. Sementara Sipahutar dan Khairani (2013) dalam kesimpulan penelitiannya mengungkapkan adanya penurunan opini disebabkan pelanggaran yang material atas peraturan perundang-undangan serta ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.

Kerangka Konseptual

Demi mempermudah peneliti dalam memahami permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya kerangka pemikiran.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis Penelitian

- H¹: Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap Opini Audit
H²: Ketidak Patuhan Peraturan Perundang-Undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Opini Audit.

METODOLOGI

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau (BPK RI Pekanbaru) Jl. Jend. Sudirman No.721, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28288. Waktu penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023.

Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini populasi yang dipilih adalah seluruh auditor yang bekerja di di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yaitu 55 orang. (Data riau.bpk.go.id). Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian

ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan cara sampel jenuh. *Sampling* jenuh yaitu teknik pengambilan sampel yang seluruh anggota populasi nya dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini yaitu auditor yang berjumlah 55 orang (Data riau.bpk.go.id).

Jenis Sumber Data

Data langsung dari pihak pertama (data primer). Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Tujuan peneliti menggunakan data primer yaitu agar pemerolehan data dapat diterima secara langsung oleh sumber. Data diperoleh dengan mengirimkan kuesioner secara langsung ataupun melalui perantara. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari auditor yang bekerja di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau tersebut sebagai responden dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah skor masing-masing indikator variabel yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dibagikan kepada responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Pada penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah auditor yang bekerja di di BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Data diperoleh dengan mengirimkan kuesioner secara langsung ataupun melalui perantara. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah

terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden dalam penelitian ini.

Model Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, di mana pengolahannya menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis regresi linear berganda mendeteksi pengaruh dua atau lebih variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat). Peneliti menggunakan program SPSS versi 26.0 (*Statistical Product and Service Solutions*) untuk melakukan perhitungan, pengolahan dan analisa untuk meregresikan model yang telah dirumuskan.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Opini Audit

a : Konstanta

b1b2b3: Koefisien Regresi

X1 : Sistem Pengendalian Intern (SPI)

X2 : Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

E : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Opini Audit	47	30	50	42,26	5,084
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	47	21	40	33,91	5,004

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	47	20	35	30,13	4,543

Sumber : (Hasil Pengolahan Data, 2023)

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dijelaskan hasil statistik deskriptif pada variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Opini Audit (Y)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 30, nilai maximum 50 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 42.26 dengan standar deviasi sebesar 5.084. Nilai rata-rata dan standar deviasi opini audit menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

b. Sistem Pengendalian Intern (SPI) (X1)

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 21, nilai maximum 40 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 33.91 dengan standar deviasi sebesar 5.004. Nilai rata-rata dan standar deviasi sistem pengendalian intern (SPI) menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

c. Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X2).

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum sebesar 20, nilai maximum 35 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 30.13 dengan standar deviasi sebesar 4.543. Nilai rata-rata dan

standar deviasi ketidak patuhan pada peraturan perundang-undangan standar akuntansi pemerintahan (SAP) menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu uji dalam penelitian yang dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pertanyaan	R hitung	R tabel	Ket
Opini Audit (Y)	Y.1	0,811	0.243	Valid
	Y.2	0,662	0.243	Valid
	Y.3	0,754	0.243	Valid
	Y.4	0,720	0.243	Valid
	Y.5	0,811	0.243	Valid
	Y.6	0,662	0.243	Valid
	Y.7	0,745	0.243	Valid
	Y.8	0,720	0.243	Valid
	Y.9	0,811	0.243	Valid
	Y.10	0,662	0.243	Valid
Sistem Pengendalian Intern (SPI) (X1)	X1.1	0,598	0.243	Valid
	X1.2	0,780	0.243	Valid
	X1.3	0,810	0.243	Valid
	X1.4	0,742	0.243	Valid
	X1.5	0,804	0.243	Valid
	X1.6	0,728	0.243	Valid
	X1.7	0,563	0.243	Valid
	X1.8	0,725	0.243	Valid
Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X2)	X2.1	0,693	0.243	Valid
	X2.2	0,697	0.243	Valid
	X2.3	0,809	0.243	Valid
	X2.4	0,805	0.243	Valid
	X2.5	0,835	0.243	Valid
	X2.6	0,728	0.243	Valid
	X2.7	0,694	0.243	Valid

Sumber : (Hasil Pengolahan Data, 2023)

Berdasarkan tabel 2. Di atas dapat dilihat bahwa dari uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ untuk setiap pertanyaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk setiap pertanyaan pada masing masing variabel dinyatakan valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sendiri digunakan untuk mengetahui konsistensi hasil kuesioner yang digunakan secara berulang.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar	Keterangan
Opini Audit (Y)	0,903	0,7	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern (SPI) (X1)	0,864	0,7	Reliabel
Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X2)	0,866	0,7	Reliabel

Sumber : (Hasil Pengolahan Data, 2023)

Berdasarkan tabel 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari uji reliabilitas yang dilakukan menunjukkan bahwa masing masing variabel baik variabel independen maupun dependen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* $> 0,7$ sehingga dapat disimpulkan

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Sistem Pengendalian Intern (SPI) (X1)	.971	1.030	Tidak ada multikolinearitas
Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X2)	.971	1.030	Tidak ada multikolinearitas

bahwa semua instrument yang digunakan dalam penelitian ini reliabel

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Dapat dikatakan bahwa tingkat signifikansi data yang berdistribusi normal lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4. berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	47
Normal Parameters ^{a,b}	Mean ,0000000 Std. Deviation 4,10122256
Most Extreme Differences	Absolute ,107 Positive ,049 Negative -,107
Test Statistic	,107
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200 ^{c,d}

Sumber : (Hasil Pengolahan Data, 2023)

Berdasarkan tabel 4. diatas dapat dilihat bahwa nilai *kolmogorov-smirnov* sebesar 0,200. Dengan nilai signifikan 0,200 > 0,05 artinya data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Untuk menunjukkan ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF).

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas a. *Dependent Variable*: Opini Audit

Sumber : (Hasil Pengolahan Data, 2023)

Berdasarkan tabel 5. diatas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel independen > 0,10 dan untuk nilai VIF setiap variabel sendiri < 10. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dan data dalam penelitian ini merupakan data yang baik dan layak untuk digunakan.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu penelitian ke penelitian lainnya.

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	9,141	3,145		2,906	,006
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	-,106	,072	-,215	-1,460	,151

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandar- dized Coefficients	Standard ized Coeffi- cients			
	B	Std. Error	Beta		
Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	-,077	,080	-,142	-,965	,340

Sumber : (Hasil Pengolahan Data, 2023)

Berdasarkan tabel 6. dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing variabel melebihi nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas untuk masing-masing variable.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang dilakukan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel dalam penelitiannya dan digunakan mengukur pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		
	Unstandar- dized Coefficients	Standard- dized Coeffi- cients	
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	16,033	5,456	

Model	Coefficients ^a		
	Unstandar- dized Coefficients	Standard- dized Coeffi- cients	
	B	Std. Error	Beta
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	,441	,125	,434
Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	,374	,138	,334

Sumber : (Hasil Pengolahan Data, (2023)

Berdasarkan tabel 7. di atas, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y=16,033 + 0,441 X1 + 0,374 X2 + e$$

Keterangan :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 16,033 memiliki arti jika variabel independen diasumsikan nol (0) maka variabel opini audit yang merupakan variabel dependen memiliki nilai sebesar 16,033.

2. Nilai koefisien untuk variabel sistem pengendalian intern (SPI) (X1) adalah sebesar 0,441. hal ini berarti setiap peningkatan variabel sistem pengendalian intern (SPI) (X1) sebesar 1 satuan maka terjadi peningkatan variabel opini audit (Y) sebesar 0,441 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

3. Nilai koefisien untuk variabel ketidak patuhan pada peraturan perundang-undangan standar akuntansi pemerintahan (SAP) (X2) adalah sebesar 0,374 hal ini berarti setiap peningkatan variabel ketidak patuhan pada peraturan perundang-undangan standar akuntansi pemerintahan (SAP) (X2) sebesar 1 satuan maka akan terjadi

peningkatan variabel opini audit (Y) sebesar 0,374 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

**Uji Hipotesis
Uji Parsial (T)**

Uji t atau *test of significance* digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen bersifat menentukan (*significance*) atau tidak, dengan kriteria berdasarkan nilai signifikan < 0,05 maka variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya jika nilai signifikannya > 0,05 maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji t ditunjukkan dalam tabel 8. berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (T)
Coefficients^a

Model	B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
1 (Constant)	16,033	5,456		2,939	,005		
Sistem Pengendalian Internal (SPI)	,441	,125	,434	3,515	,001	,971	1,030
Ketidak Patuhan pada Peraturan Perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	,374	,138	,334	2,710	,010	,971	1,030

Sumber : (Hasil Pengolahan Data, 2023)

Untuk menguji hipotesis ini dilakukan dengan cara membandingkan t hitung

dengan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

Ho diterima, jika t hitung < t tabel atau sig t > α (0,05)

H1 diterima, jika t hitung > t tabel atau sig t < α (0,05)

Uji t dalam penelitian ini dilakukan pada tingkat α = 5 % atau 0,05 dengan persamaan n-k-1: alpha/2 artinya 47-2-1=44. Maka nilai t tabel dengan df 44 alpha 0,05 adalah sebesar 1,680.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terhadap Opini Audit

Dari tabel 8. diatas, terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yaitu 3,515 > 1,680 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari α = 0,05. Dari hasil pengujian terlihat, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki pengaruh terhadap Opini Audit.

Pengaruh Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Opini Audit

Dari tabel 4.13 diatas, terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yaitu 2,710 > 1,680 dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 yang lebih kecil dari α = 0,05. Dari hasil pengujian terlihat, maka dapat disimpulkan bahwa Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki pengaruh terhadap Opini Audit

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen yang diteliti

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Model Summary			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,774 ^a	,599	,580	2,516

a. Predictors: (Constant), Ketidapatuhan

Pada Peraturan Perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sumber : (Hasil Pengolahan Data, 2023)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dalam tabel *R Square* sebesar 0,599 atau 59,9%. Artinya 59,9% opini audit di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau (BPK RI Pekanbaru) dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern (SPI), dan ketidapatuhan pada peraturan perundang-undangan standar akuntansi pemerintahan (SAP). dan sisanya 40,1 %

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terhadap Opini Audit

Hasil pengujian hipotesis 1 (H_1) pada tabel 4.13 terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $3,515 > 1,680$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dari hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) memiliki pengaruh terhadap opini audit di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau (BPK RI Pekanbaru).

Berdasarkan teori atribusi penyebab dari terjadinya suatu kejadian atau perilaku, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam penelitian ini, aspek akibat/ kejadian yang ditimbulkan adalah pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK.

Sedangkan faktor penyebab terjadinya perolehan opini WTP tersebut dapat dijelaskan dari faktor internal maupun eksternal, adapun faktor internal nya yaitu sistem pengendalian intern. Opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah akan dipengaruhi oleh SPI yang ada pada lingkungan entitas yang diaudit. SPI ini didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu mendeteksi kelemahan yang berakibat pada permasalahan dalam aktivitas pengendalian yang menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syaputra, 2019) yang menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap opini audit.

Pengaruh Ketidapatuhan Pada Peraturan Perundang-undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Opini Audit

Hasil pengujian hipotesis 2 (H_2) pada tabel 4.13 terlihat bahwa hasil pengolahan data menunjukkan bahwa t hitung $>$ t tabel yaitu $2,710 > 1,680$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dari hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa ketidapatuhan pada peraturan perundang-undangan standar akuntansi pemerintahan (SAP) memiliki pengaruh terhadap opini audit di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau (BPK RI Pekanbaru). Ketidapatuhan pada peraturan perundang-undangan standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah selain pemeriksaan terhadap sistem pengendalian

internal. Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah audit telah mengikuti serangkaian prosedur yang spesifik, tata cara, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (Arens, 2015). Standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK-RI menyatakan kewajiban pemeriksa untuk menyiapkan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang mengungkapkan temuan ketidakpatuhan yang berpengaruh secara langsung dan materil terhadap laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi Ananda Putri, (2018) yang menunjukkan bahwa pengaruh kepatuhan terhadap undang-undang berpengaruh terhadap opini audit.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel-variabel yang memengaruhi opini audit. Variabel-variabel yang diujikan dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian intern (SPI), dan ketidak patuhan pada peraturan perundang-undangan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap Opini Audit.
2. Ketidak Patuhan Pada Peraturan Perundang-Undangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Opini Audit.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, saran yang diberikan yaitu:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah sampel dengan memperluas

area sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat menggambarkan keadaan yang lebih nyata.

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah teknik wawancara atau pertanyaan lisan secara langsung kepada responden agar hasil yang didapatkan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N., Atmadja, A. T., Se, A., Herawati, N. T., & Ak, S. (2014). Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor, Independensi, Dan Pengalaman Auditor Terhadap Tanggungjawab Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Dan Kekeliruan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik (Kap) Wilayah Bali). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)*
- Arens, A. A. (2012). *Auditing And Assurance Services: An Integrated Approach*.
- Arens, A.A., R.J. Elder, Dan M. S. Beasley. 2008. *Auditing Dan Jasa Assurance Pendekatan T\Terintegrasi. Jilid I Edisi Keduabelas, Jakarta: Erlangga*
- Atyanta, R. (2011). Analisis Opini Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten X Di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 16.
- Fatimah, D. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, Opini Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintahan Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pekanbaru: Pascasarjana Universitas Riau.
- Heider, F. (1958). *The Psychology Of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Holtzworth-Munroe, A., & Jacobson, N. S. (1988). *Toward A Methodology For Coding Spontaneous Causal Attributions:*

- Preliminary Results With Married Couples. *Journal Of Social And Clinical Psychology*, 7, 101-112.
- Putri, M. D. (2018). Pengaruh Kondisi Keuangan, Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Dan Kepatuhan Perusahaan Pada Hukum Dan Peraturan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern. *Abstract Of Undergraduate Research, Faculty Of Economics, Bung Hatta University*, 13(1).
- Putri, S. A., Suarthana, W. R., & Edi, S. (2021). Pengaruh Temuan Sistem Pengendalian Intern Dan Temuan Audit Kepatuhan Terhadap Opini Audit Bpk Pada Pemerintah Daerah Tahun Lk 2014-2015. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Akuntansi*, 5(2).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- <https://inforiau.id/2020/09/21/hasil-audit-lkpd-pemda-se-riau-2018-2019-kerugian-negara-rp466-miliar/>
- <https://riau.bpk.go.id/30-auditor-bpk-akanikuti-pelatihan/>